

KOP
KEPALA
DAERAH

SURAT PERNYATAAN

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini Gubernur/Bupati/Walikota*)
menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota*)
bersedia melaksanakan kegiatan yang didanai dari Dana Percepatan Pembangunan
Infrastruktur Daerah (DPPID) Tahun Anggaran 2011 dengan memperhatikan ketentuan
sebagai berikut:

1. Akan mencantumkan DPPID Tahun Anggaran 2011 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2011 atau menyampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal dana yang sudah disalurkan tidak dilaksanakan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka kami akan mengembalikan dana yang sudah disalurkan tersebut ke Kas Negara.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagai syarat penyaluran Tahap I DPPID Tahun Anggaran 2011.

Tempat, tanggal

Gubernur/Bupati/Walikota*)

(tanda tangan asli dan stempel basah)

Nama

*) Coret yang tidak perlu

MENTERI KEUANGAN,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



LAPORAN REALISASI PENYERAPAN
DANA PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH (DPPID)
TAHUN ANGGARAN 2011

Yang bertanda tangan di bawah ini Gubernur/Bupati/Walikota^{*)} menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan DPPID Tahun Anggaran 2011 Tahap I sebagai berikut:

Penerimaan dari Rekening Kas Umum Negara:
Tahap I : Rp

Realisasi Pembayaran ke Pihak Ketiga melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Daerah:
Tahap Ini : Rp

Sisa DPPID di Rekening Kas Umum Daerah : Rp
Persentase Sisa DPPID :%

No.	Bidang	Pagu	Realisasi Pembayaran dari Rekening Kas Umum Daerah (melalui SP2D Daerah)	Sisa Pagu
		Rp	Rp	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) - (4)
1.	Infrastruktur Bidang Pendidikan			
2.	Infrastruktur Bidang Transmigrasi			
3.	Infrastruktur Bidang Lainnya			
	a. Kesehatan			
	b. Jalan/Jembatan			
	c. Irigasi			
	d. Air Minum			
	e. Sanitasi			
	f. Kelautan dan Perikanan			
	g. Pertanian			
	h. Lingkungan Hidup			
	i. Sarana Perdagangan			
	j. Waduk dan/atau Embung			
	k. Prasarana Pemerintahan Daerah			
	Jumlah			

Tempat, tanggal
Gubernur/Bupati/Walikota^{*)}

(tanda tangan asli dan stempel basah)

Nama

^{*)} Coret yang tidak perlu

MENTERI KEUANGAN,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

KOP
KEPALA
DAERAH

LAPORAN PENYERAPAN
DANA PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH (DPPID)
TAHUN ANGGARAN 2011

Yang bertanda tangan di bawah ini Gubernur/Bupati/Walikota*) menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan DPPID Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut:

Penerimaan dari Rekening Kas Umum Negara:

Tahap I : Rp
Tahap II : Rp
Total : Rp

No.	Bidang	Pagu	Realisasi Pembayaran dari Rekening Kas Umum Daerah (melalui Surat Perintah Pencairan Dana Daerah)	Sisa DPPID di Kas Umum Daerah	Realisasi Pelaksanaan Fisik Kegiatan s.d. tanggal 31 Desember 2011
		Rp	Rp	Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Infrastruktur Bidang Pendidikan				
2.	Infrastruktur Bidang Transmigrasi				
3.	Infrastruktur Bidang Lainnya				
	a. Kesehatan				
	b. Jalan/Jembatan				
	c. Irigasi				
	d. Air Minum				
	e. Sanitasi				
	f. Kelautan dan Perikanan				
	g. Pertanian				
	h. Lingkungan Hidup				
	i. Sarana Perdagangan				
	j. Waduk dan/atau Embung				
	k. Prasarana Pemerintahan Daerah				
	Jumlah				

Tempat, tanggal
Gubernur/Bupati/Walikota*)

(tanda tangan asli dan stempel basah)

Nama

*) Coret yang tidak perlu

MENTERI KEUANGAN,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

KOP
KEPALA
DAERAH

DAFTAR SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)
YANG DITERBITKAN UNTUK PROGRAM/KEGIATAN YANG DIDANAI
OLEH DANA PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH (DPPID)
TAHUN ANGGARAN 2011

No.	SP2D		Nilai (Rp)	Ket.
	Nomor	Tanggal		
1.	Infrastruktur Bidang Pendidikan			
	-			
	-			
	Jumlah			
2.	Infrastruktur Bidang Transmigrasi			
	-			
	-			
	Jumlah			
3.	Infrastruktur Bidang Lainnya			
	a. Kesehatan			
	-			
	-			
	b. Jalan/Jembatan			
	-			
	-			
	c. dan seterusnya.			
	Jumlah			
	TOTAL			

Tempat, tanggal ...
Kepala Biro/Dinas/Bagian¹⁾

(tanda tangan asli dan stempel basah)

Nama ...
NIP ...

¹⁾ Diisi sesuai nomenklatur instansi pengelola keuangan

MENTERI KEUANGAN,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO